

## Pendidikan Era Orde Baru; Implementasi dan Realitas Pelaksanaan (1967-1990)

Khaeruddin <sup>a,1,\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

<sup>1</sup>[khaeruddin@unm.ac.id](mailto:khaeruddin@unm.ac.id)

\* Corresponding Author; Khaeruddin



Received 11 November 2024; accepted 19 December 2024; published 30 December 2024

### ABSTRACT

*In the New Order era in Indonesia (1967-1998), the government implemented various policies to improve the quality and access to education. However, there is a discrepancy between the policies announced and the reality of their implementation in the field. The main problems faced include unequal access to education, low quality of education, and lack of adequate educational facilities and infrastructure. This study aims to analyze the transformation of education in Indonesia during the New Order era, from 1967 to 1998. The main focus is on the education policies implemented by the government and the reality of their implementation in the field. This study also evaluates the impact of this policy on the quality of education and equal access to education for all levels of society. This research uses a qualitative approach method with literature review. Data was collected from various related journal sources, articles and books. The research results show that although there have been some achievements in terms of increasing access to education, many of the policies implemented have focused more on political control than improving the quality of education. The reality of policy implementation is often not in line with the initial objectives, resulting in various problems such as lack of facilities, low quality of teaching, and educational inequality. This research provides insight into the complexity of educational transformation in the New Order era and its implications for the development of education in Indonesia.*

### KEYWORDS

Education,  
Transformation, Policy,  
Stability

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## 1. Pendahuluan

Untuk menciptakan suatu kemajuan bangsa, maka sangat diperlukan pendidikan sebagai faktor pendukung sekaligus untuk membangun sumber daya manusia yang mumpuni. Manusia adalah sasaran pendidikan itu sendiri. Sehingga, pendidikan seringkali memiliki pengertian sebagai alat memanusiakan manusia. Manusia mempunyai potensi yang besar untuk menjadi manusia. Dari analisis tersebut terlihat bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam membantu siswa dalam mengembangkan dan mewujudkan potensi dirinya secara maksimal (Muzammil, 2016).

Membantu kita memahami sejarah perkembangan sistem pendidikan di Indonesia, yang menarik untuk mengkaji transformasi pendidikan pada periode Orde Baru. Penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan dirumuskan dan dilaksanakan dalam konteks politik, sosial, dan ekonomi pada era tersebut.

Pelaksanaan berbagai kebijakan-kebijakan tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk disparitas regional, keterbatasan anggaran, dan praktik-praktik korupsi. Analisis terhadap kebijakan dan realitas pelaksanaan pendidikan pada era ini penting untuk memahami dampak jangka panjangnya terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak usia 7 hingga 12 tahun, Pemerintah Orde Baru telah mulai membangun berbagai fasilitas pendidikan dan memberikan tunjangan kepada mereka. Dimulai dari Kelas 1 dan berlanjut hingga Kelas 7, program utama yang digunakan adalah Wajib Belajar 9 Tahun. Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan

bahwa setiap anak Indonesia menerima kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar, yang penting untuk meningkatkan standar sumber daya manusia.

Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Realitas di lapangan sering kali berbeda dengan rencana ideal yang diusung pemerintah. Tantangan geografis, keterbatasan anggaran, serta ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan program pendidikan. Di banyak daerah terpencil, fasilitas pendidikan masih sangat minim, dan kualitas pengajaran (Kusmawati et al., 2023).

Selain itu, era Orde Baru juga diwarnai oleh kontrol politik yang ketat, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Kurikulum sekolah diarahkan untuk mendukung ideologi dan stabilitas politik rezim. Sebagai pusat negara, Pancasila mempunyai seperangkat prinsip filosofis, yaitu sebagai sarana pembangkit tekad melalui sikap, perilaku laku, dan juga sebagai sarana untuk mencapai atau mencapai kemajuan dalam kehidupan masyarakat luas, beragama, dan bernegara. Pada ayat P4 disebutkan bahwa setiap orang harus dapat hidup damai dengan Pancasila. Salah satu hal yang membuat manusia berharga adalah bahwa mereka mampu mencapai dan melampaui ketinggian dan keluasan yang luar biasa. Sepanjang hidup, populasi tidak dapat dipuaskan oleh satu orang pada satu waktu; sebaliknya, mereka harus terus-menerus membentuk komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka (Neolaka & Neolaka, 2017).

Meskipun demikian, transformasi pendidikan pada era Orde Baru tidak dapat dipandang sebelah mata. Periode ini juga membawa banyak perbaikan dan kemajuan dalam sistem pendidikan Indonesia. Peningkatan angka partisipasi sekolah, pengurangan tingkat buta huruf, dan pencapaian dalam berbagai kompetisi akademik internasional adalah beberapa bukti nyata dari hasil kebijakan pendidikan Orde Baru. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan dan realitas pelaksanaan pendidikan pada periode 1990-1994 memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pendidikan di Indonesia, serta pelajaran berharga untuk perbaikan sistem pendidikan di masa depan.

Kajian ini memaparkan mengenai sistem pendidikan di masa Orde Baru yang dinilai sebagai masa yang cukup otoriter. Berbagai kebijakan terhadap perkembangan kemajuan pendidikan sangat banyak dilahirkan di masa Orde Baru. Namun, tidak banyak yang penyelenggaraannya berjalan dengan baik bahkan seringkali bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk menyusun seperti apa kebijakan tersebut yang dilahirkan di era Orde Baru, dan bagaimana realitas di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 2. Metode

Pada materi ini, tersusun menggunakan pendekatan empiris dengan metodologi deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka, yang menggunakan beberapa dokumen dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema artikel (Setiyawan & Wahyuni, 2023) berupa berbagai referensi buku, artikel jurnal, prosiding seminar, dan berbagai naskah akademik lainnya (Nursyifa, 2019) yang berkaitan seputar sejarah pendidikan di era Orde Baru.

Kajian ini memaparkan mengenai sistem pendidikan di masa Orde Baru yang dinilai sebagai masa yang cukup otoriter. Berbagai kebijakan terhadap perkembangan kemajuan pendidikan sangat banyak dilahirkan di masa Orde Baru. Namun, tidak banyak yang penyelenggaraannya berjalan dengan baik bahkan seringkali bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Adapun tantangan dalam penyusunan materi ini, adalah mendapatkan sumber referensi berupa buku yang cukup langkah.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Kebijakan pendidikan era Orde Baru:

Dari generasi ke generasi, pendidikan Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Berbagai fenomena dinamis yang terjadi, seperti perubahan sosial, ekonomi, agama, bahkan politik, menjadi kekuatan utama dalam reformasi dan kemajuan pendidikan. Adapun Khususnya di era Orde Baru, setiap fenomena yang terjadi membawa banyak perubahan. Terutama dalam sistem pendidikan, yang

sepanjang semester menghadapkan mahasiswa pada beberapa situasi unik. Singkatnya, Orde Baru dalam pertahanan disebut sebagai taraf hidup nasional dan berdasarkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Kuatnya perpolitikan di dalam negeri khususnya di era Orde Baru, sehingga menjadi satu alat legitimasi dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pendidikan pada khususnya sangat besar dipengaruhi oleh kuatnya politik Orde Baru. Tujuan pendidikan umum tersebut diketahui diubah dan digantikan dengan UUD 1945 bab XII pasal 31 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Setiap warga negara di setiap negara mempunyai hak untuk menerima pendidikan.
- b) Pemerintah diharuskan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan nasional yang telah diubah dalam peraturan-undangan diperkuat secara memadai.

Undang-undang terkuat tersebut di atas dengan diterbitkannya pasal 4 ketetapan MPRS nomor XXI/MPRS/1966, yang secara umum mencakup pokok-pokok wajib sebagai berikut:

- a) Mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat kepercayaan beragama;
- b) Mempertinggi kecerdasan maupun keahlian; dan
- c) Membina serta mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Dilihat dari apa yang ditetapkan oleh MPRS, selanjutnya akan menjadi factor maupun indikator terhadap perubahan pendidikan nasional yang berawal dari Orde Lama kemudian mengarah kepada era Orde Baru. Peralihan tersebut diperjelas dengan setidaknya oleh 2 hal, diantaranya usaha terwujudnya manusia yang pancasilais dengan latar belakang meletusnya peristiwa Gerakan 30 September dan peristiwa 1 Oktober, dan masa dimana Partai Komunis Indonesia dituduh oleh Orde Baru serta dicap sebagai penghianat yang memiliki tujuan mengubah dasar negara Pancasila menjadi Komunis. Selanjutnya yang kedua adalah menanamkan pengaruh terhadap mental masyarakat yang sebelumnya telah termakan oleh doktrin doktrin Manipol USDEK yang dicanakan oleh Presiden Soekarno (Smith & Sya'diyah, 2023).

Dari berbagai peraturan maupun dengan segala peristiwa yang terjadi, maka era Orde Baru kemudian menciptakan masa baru dengan melepaskan segala bentuk pengaruh maupun hubungannya baik dengan Soekarno maupun insiden yang diciptakan oleh Partai Komunis Indonesia. Dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru melalui TAP MPRS, terlihat bahwa segala perguruan-perguruan besar akan diberikan ruang untuk kebebasan pada mimbar/ilmiah secara luas, namun tanpa adanya segala bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945 Pancasila (Andrea, 2016).

Mengenai bagaimana upaya pemerintah di masa Orde Baru dalam menunjukkan perhatiannya terhadap pendidikan, mulai terlihat pada tahun 1973 dengan perluasan peluang pendidikan dasar. Pemanfaatan biaya anggaran yang dimiliki negara, pemerintah mencanangkan pemerataan pendidikan dengan berlandaskan Inpres nomor 10 tahun 1977, yang membahas tentang program dorongan pembangunan sekolah dasar.

Kebijakan kedua adalah penerapan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamatan Pancasila) atau pendidikan Pancasila yang hakikatnya sudah ada sejak masa Orde Baru. Penetapan P4 dapat dilaksanakan di bidang pendidikan melalui program penataran yang menggunakan modul, lomba cerdas, dan pertunjukan kesenian tradisional. Kurikulum P4, sebagai acuan kurikulum semester pertama bulan Oktober 1978, menguraikan tujuan, tantangan, teknik, bahan, dan penilaian yang tercantum dalam lampiran surat keputusan Kepala BP7 Pusat Nomor 08/BP7/II1983. Dalam ketetapan MPR P4 dan GBHN, dalam upaya mewujudkan masyarakat umum yang mampu berkomunikasi, mencermati, dan juga menyuarakan keprihatinan terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang didirikan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (BP7 Pusat, 1985:5).

Sebagai lambang negara, Pancasila mempunyai warisan filosofis yang kaya karena merupakan pandangan, atau orientasi terhadap perilaku yang dikembangkan secara bertahap untuk mempengaruhi perilaku melalui sikap, perilaku, dan cara-cara lain dalam berbangsa, masyarakat, dan perilaku. Dalam RPP P4 dijelaskan bahwa pengetahuan tentang Pancasila diperlukan untuk kelestarian kehidupan manusia. Yang mana hal terpenting bagi umat manusia adalah menjunjung tinggi dan melestarikan hak dan nilai-nilai asasi manusia. Sepanjang hidup, penduduk tidak dapat dipuaskan oleh satu orang; sebaliknya, mereka akan terus membentuk komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka (Si, n.d.).

Presiden Soeharto mendorong perluasan P4, yang diharapkan dapat membantu masyarakat bangsa dan negara menjadi lebih tangguh terhadap tantangan yang akan datang. Selain itu, menjadi warga negara yang berkomitmen penuh terhadap demokrasi dan mampu menyelenggarakan pemilu secara adil dan tidak memihak. Kebijaksanaan Pancasila sangat diharapkan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan. Dengan menanamkan Pancasila di dalam kelas, kita dapat melahirkan generasi baru penerus bangsa Indonesia yang mampu menantang nilai-nilai dan tradisi bangsa. Pelatihan Pendidikan Pancasila dan Mental Ideologi (P4) berfungsi sebagai sarana penanaman nasionalisme dan loyalitas pemerintah kepada mahasiswa. Kondisi ini menimbulkan perdebatan tentang independensi pendidikan dan kebebasan berpikir di kalangan akademisi dan wajib di semua jenjang pendidikan, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai masyarakat.

Kutipan-kutipan nasionalistik dimasukkan dalam kurikulum, terutama dimasukkannya tema pendidikan moral Pancasila (PMP) dalam kurikulum tahun 1975. "Topik-topik yang dimasukkan dalam buku teks kelas satu adalah kerapian, cinta kasih, kebanggaan, menghina, saling menghormati, kerukunan, keberanian, kebersihan, dan kesehatan, serta hemat, keadilan, ketaatan, kasih sayang, kesetiaan, pengabdian, dan saling menghormati Niels Mulder (2001:30 -31) dinyatakan mengacu pada penerapan topik moral Pancasila (Neolaka & Neolaka, 2017).

Sebagai mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang harus dipelajari pada tahun 1983, berdasarkan keputusan Keendikbud Nomor 0461/U/1983. Pada tahun mendatang, mata kuliah ini menjadi bagian dari Pendidikan Pancasila. Selanjutnya diterapkan kurikulum PP tahun 1984, khususnya Kurikulum Pancasila 1994 yang menekankan pada nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme yang terdapat pada P4. Pendidikan Pancasila dan Pelatihan Mental Ideologi (P4) menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan loyalitas kepada pemerintah. Kondisi ini menimbulkan perdebatan tentang independensi pendidikan dan kebebasan berpikir di kalangan akademisi dan masyarakat.

### 3.2. Program Wajib Belajar 6 Tahun

Dalam kesempatan lainnya, Presiden Soeharto memperkenalkan program untuk menindaklanjuti perkembangan kemajuan pendidikan di Indonesia yakni, program Gerakan Wajib Belajar. Program sangat diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan cita-cita amanat pembukaan UUD 1945 dengan poin pentingnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kemerdekaan. Program Gerakan Wajib Belajar memberikan ruang dan peluang yang adil terhadap masyarakat yang berusia 7-12 tahun untuk berkesempatan dalam mengenyam pendidikan. Program ini juga mencakup baik di daerah-daerah perkotaan maupun pedesaan/pedalaman. Program Gerakan Wajib Belajar inipun kemudian terealisasi pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1984 sebagai salah satu program PELITA IV. Pelaksanaan Program ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang dipegang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Soeharto yaitu Nugroho Notosusanto dengan wacananya untuk meratakan pendidikan di Indonesia. Sehingga lahirlah Program wajib belajar ini.

Dasar hukum dari program wajib belajar ini, bersumber dari UU No.4 Tahun 1950 tentang Pokok Pengajaran di Sekolah yang dimana selanjutnya akan ditetapkan sebagai Undang-Undang Pendidikan tahun 1984. Langkah dalam pelaksanaan program wajib belajar, menetapkan berbagai prasyarat salah satunya adalah peserta didik berusia 7-12 tahun diharuskan dapat membaca, menulis, dan juga berhitung.

### 3.3. Program Wajib Belajar 9 Tahun

Salah satu program selanjutnya di era Orde Baru yaitu program wajib belajar 9 tahun yang baik dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 0306/U/1995, maupun UU No. 20 Tahun 2003, menjelaskan bahwa program wajib belajar hanya diikuti oleh warga negara yang berusia 7-15 tahun. Dijelaskan pada UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya diatur dalam Pasal 31, mengatakan bahwa:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran,
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.

Wajib menyelesaikan program dalam sembilan tahun, dengan kinerja yang baik dalam pembelajaran formal, informal, dan campuran. Sebagai bagian dari program wajib sembilan tahun pendidikan formal, siswa akan diajarkan mata pelajaran seperti SD, MI, SMP, MTs, bahkan sederajat. Sedangkan kegiatan

yang berkaitan dengan pendidikan nonformal dilaksanakan melalui paket A dan B. Selain itu, pendidikan masyarakat dan pendidikan lingkungan hidup dilakukan dalam suasana informal. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tanpa memandang agama, etnis, status sosial, atau gender, program wajib belajar 9 tahun dilaksanakan pada usia 7-15 tahun.

Berbagai hal atau strategi dilaksanakan oleh pemerintah mengenai program belajar 9 tahun. Terdapat 4 strategi dalam meningkatkan pendidikan oleh pemerintah, diantaranya, yang pertama adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, kedua yaitu keterkaitan atau relevansi antara pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan, selanjutnya adalah peningkatan kualitas tenaga, sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan, dan yang terakhir yaitu keefektifan maupun efisiensi penyelenggaraan pendidikan yang dimana harus pilar utama dalam pengembangan Pendidikan (Cahyaningsih, 2016).

### 3.4. Realita Pelaksanaan Pendidikan Era Orde Baru

Orde Baru adalah masa yang demikian dikenal dengan era Orde Konstitusional dan juga era Orde Pembangunan. Orde baru yang merupakan peralihan dari Orde Lama yang nantinya juga memberikan dampak tersendiri terhadap berbagai bidang politik maupun terkhusus pada bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan Orde Baru sesungguhnya bertujuan membangun manusia yang seutuhnya dan menjaga keseimbangan antara Rohani dan jasmani dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Dalam berbagai kebijakan yang dilahirkan pada era Orde Baru memang menunjukkan jalan menuju kemajuan pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ada banyak hal hal yang dianggap bertentangan ataupun menyimpang dari apa yang telah dicanangkan dan diprogramkan. Pendidikan yang sesungguhnya di era Orde Baru memiliki anggaran paling sedikit sehingga ini sangatlah bertentangan dengan segala ketetapan Perundang-undangan tentang pendidikan. Sistem pendidikan sentralisasi atau terpusat justru dalam penerapannya menjadikan kualitas pendidikan semakin menurun (Khaeruddin & Rahmania, 2022).

Sistem doktrinisasi yang merupakan sistem kebijakan pemerintahan Orde Baru mengenai pendidikan memberikan dampak yang menyebabkan masyarakat menjadi dilema dalam hal mengikuti perkembangan zaman. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pada sistem doktrinisasi mewajibkan penerapan P4 baik pada tingkat Sekolah Dasar maupun Perguruan Tinggi. P4 tersebut berisi butir Pancasila dan menolak segala pengaruh dari luar baik pengaruh buruk maupun pengaruh baik. Sehingga, ada ketakutan dalam melangkah lebih maju.

Ada banyak persepsi mengenai sistem pemerintahan di era Orde Baru yang banyak dinilai sebagai masa dengan sistem yang cukup otoriter. Orientasi perpolitikan yang cukup ketat, yang menjadikan segala bentuk program pendidikan dimana tujuan utamanya adalah memperbaiki taraf kehidupan rakyat dan meningkatkan SDM Indonesia justru menghalangi kemajuan rakyat. Sangat jelas bahwa, segala apa yang telah menjadi keputusan pemerintah di era Orde Baru tidak diperbolehkan untuk dikritik maupun dilanggar (Safei & Hudaidah, 2020).

Penyelenggaraan otonomi kebijakan pendidikan di daerah cukup menggembarakan terutama dalam hal pendidikan dasar. Dalam rangka pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun, pemerintah pusat mulai memberikan kebebasan kepada daerah secara bertahap atau dekosentrasi. Akan tetapi, semuanya sangat tidak berjalan dengan baik. Penyelenggaraan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi (KIS) antara Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak berjalan dengan baik. Ada banyak temuan data mengenai kekurangan instansi instansi yang melaksanakan penyelenggaraan KIS. Ketimpangan ketimpangan seperti banyaknya instansi yang saling melempar tanggungjawab meskipun penyelenggaraan KIS di tempat tempat lainnya telah berjalan.

Orde Baru (1968-1998) dikenal sebagai era pembangunan nasional dengan salah satu ciri khasnya adanya Intruksi Presiden atau Inpres Pendidikan Dasar. Dalam pelaksanaannya, sangat bertimbal balik dari apa yang diharapkan. Daripada segi kuantitas pengaplikasian Inpres ini, hanya mementingkan banyaknya lulusan terdidik dan sangat jauh dari kualitas pendidikan dan pengajaran. Pendidikan era Orde Baru tidak dapat dipungkiri dengan masa kuat kuatnya dan ketatnya pendidikan sangat berpengaruh terhadap sistem pendidikan.

Didalamnya terdapat berbagai factor negative antara lain seperti:



1. Hasil hasil produk pendidikan dituntut hanya untuk menjadi pekerja ataupun dibebani lapangan kerja. Hal ini pada akhirnya membuat sangat minimnya eksistensi manusia dalam artian tidak memanusiaikan manusia.
2. Era ini banyak tanggapan bahwa Orde Baru banyak melahirkan kaum terdidik yang sangat tumpul terhadap kepekaan sosial, serta pemikiran positivistik yang ada di tengah anak-anak muda.
3. Hal yang cukup parah adalah dihilangkannya kebebasan dalam berpendapat.

Pelaksanaan pendidikan khususnya di lingkungan perguruan tinggi sangat diwaspadai dan dipantau oleh pemerintah. Berbagai pelarangan maupun pembubaran terhadap perkumpulan atau organisasi dilakukan oleh pemerintah terhadap lingkungan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari kritik secara terbuka. Selain itu, berbagai tokoh mahasiswa menjelang tahun 1998 diculik maupun dihilangkan secara sadis dan rahasia (Herwanto, 2007). Dari poin di atas, sangat memberikan pemaparan yang jelas mengenai banyaknya pendapat mengenai pendidikan di era Orde Baru sangat berbanding terbalik dari kebiakan yang telah ditetapkan.

Periode antara tahun 1969 hingga 1970, telah tercapai pemerataan untuk mengenyam pendidikan dasar. Memasuki tahun 1995 sampai 1996, Angka Partisipasi Murni (APM), pada tingkat SD/MI usia 7-12 tahun mencapai angka 95%. Angka Melanjutkan lulusan SD/MI ke SMP mencapai angka 71,29%. Keberhasilan ini didukung oleh pendanaan yang besar. Namun, sangat disayangkan mengenai manajemen pendidikannya yang sangat tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah (Agista, 1998).

Antara kelemahan dalam peningkatan mutu pendidikan, manajemen pendidikan dalam lokakarya nasional. Antara dampak yang luar biasa dalam pendidikan, adalah bagian dari manajemen lean ini. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah siswa yang putus sekolah atau putus sekolah. Jika dibandingkan khususnya pada tahun 1995–1996, jumlah siswa yang putus sekolah adalah sekitar 7,08 persen, sedangkan 2,7% siswa mengalami putus sekolah.

### 3.5. Kurikulum dan Realitas Pelaksanaannya

Sistem pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan pembentukan kurikulum, yang bertujuan untuk mengatur strategi dan metode dalam pembelajaran. Menurut Sutarto (2015), acuan utama dalam program pendidikan sekolah adalah adanya kurikulum. Kurikulum dalam jangka waktu mesti yang dilalui oleh peserta didik dalam hal untuk memperoleh ijazah sebagai bukti dalam rangk telah mengikuti proses pembelajaran dan jenjang pendidikan. Pada, pelaksanaan kurikulum pun tidak terlepas dari segala kekurangan maupun kendala dalam penerapannya (Yamin, 2015).

Era Orde Baru sendiri, terdapat beberapa kurikulum dengan segala fenomena dalam pelaksanaannya. Kurikulum tersebut diantaranya:

1. Kurikulum 1968  
Kurikulum ini bersifat politis. Terlihat pada Pancawardhana berubah menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Adapun kekurangannya adalah pembelejaran yang cukup teoritis dan sama sekali tidak dikaitkan dengan fakta-fakta di lapangan.
2. Kurikulum 1975  
Kurikulum ini dilatarbelakangi oleh adanya pengaruh konsep manajemen yakni *Management by Objective/ MBO*. Kurikulum ini pun banyak menuai kritik karena administrasi guru yang begitu sulit dalam menyusun capaian apa saja yang ingin dicapai dalam pembelajaran.
3. Kurikulum 1984  
Pada kurikulum ini, *Process skill approach* dicanangkan. Peserta didik memiliki posisi sebagai subjek belajar yang kemudian melahirkan model CBSA yang dalam pelaksanaannya justru menciptakan ketidakteraturan dalam kelas sehingga, banyak penolakan terhadap model pembelajaran CBSA tersebut.
4. Kurikulum 1994  
Kurikulum ini merupakan perpaduan daripada kurikulum 1975 dan 1984, yang dalam pelaksanaannya ditau banyak kritik. Hal ini disebabkan oleh adanya beban dan kendala dalam penilaian belajar siswa.

### 3.6. Transformasi Kebijakan Pendidikan Orde Baru dalam Kurikulum Merdeka

Transformasi dalam ensiklopedi umum merupakan istilah ilmu eksakta yang kemudian diintrodusir ke dalam ilmu sosial dan humaniora, yang memiliki maksud perubahan bentuk dan secara lebih rinci memiliki arti perubahan fisik maupun nonfisik (bentuk, rupa, sifat, dan sebagainya) (Rinawati, 2015). Transformasi pendidikan di era digital menjadi suatu fenomena yang tak terhindarkan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini menciptakan suatu paradigma baru dalam proses pembelajaran, memengaruhi seluruh aspek dari dunia pendidikan (Rachmi et al., 2024).

Mengacu pada pendekatan pendidikan yang berfokus pada perubahan fundamental dalam cara pengajaran dan pembelajaran dilakukan, dengan tujuan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang relevan dengan tuntutan zaman modern serta menghasilkan individu yang siap menghadapi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan (Amalia & Asbari, 2023). Transformasi kebijakan pendidikan sangat penting karena dunia mengalami perubahan cepat dalam hal teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya (Rambung et al., 2023).

Pendidikan sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan manusia merupakan bagian dari pembangunan nasional (Wijaya et al., 2016). Orde baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional (Tati, 2015). Pada umumnya tujuan bersekolah pada masa Pergerakan Baru yaitu untuk membantu orang-orang yang berjiwa Pancasila, pandai, berbakat, berakhlak mulia, maupun berbudi pekerti yang bertanggung jawab atas terlaksananya perbaikan (Kusmawati et al., 2023).

Tujuan pendidikan adalah faktor yang sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapainya. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dialami bangsa Indonesia. Seperti dijelaskan sebelumnya, tujuan pendidikan Indonesia telah mengalami transformasi dari tahun ke tahun. Tujuan pendidikan yang berlaku pada waktu Orde Baru tentu saja berbeda dengan tujuan pendidikan masa kini (Naredi, 2019).

Pendidikan di abad ke-21 telah mengalami transformasi melalui penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin maju (Yusuf et al., 2023). Di era revolusi 4.0 terjadi perubahan struktur social yang berubah secara cepat ikatan sosial bergantung pada teknologi, hilangnya beberapa jenis pekerjaan, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan memiliki daya saing yang tangguh. Untuk menghadapi era revolusi 4.0, pendidikan melalui sekolah harus memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, tes formatif, guru sebagai mentor, siswa dipandang tidak sama dan menjadi tidak sama sesuai potensi atau talenta masing-masing (Amalia & Asbari, 2023). Konsep kurikulum merdeka menjadi salah satu pilar utama dalam upaya ini (Rambung et al., 2023).

Masa lampau memperjelas pemahaman kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita kenal sekarang adalah hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita (Datumula, 2021). Maka dari itu, ada beberapa kebijakan pendidikan pada masa orde baru yang pada masa kini masih digunakan dalam kurikulum merdeka, yakni :

#### 1. Pembangunan Karakter

Pendidikan pada masa orde baru lebih menekankan pada pembangunan karakter dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan budi pekerti luhur, salah satunya melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Tidak jauh berbeda dengan hal tersebut, Kurikulum Merdeka juga menekankan tujuan dalam membangun karakter anak bangsa melalui Profil Pelajar Pancasila dengan 6 elemen utama, yakni Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia. Mandiri. Bernalar Kritis. Kreatif. Bergotong Royong, dan Berkhebinekaan Global.

#### 2. Perluasan Akses Pendidikan

Pada masa orde baru, pemerintah melakukan perluasan akses pendidikan dengan membangun SD Inpres dan program pemberantasan buta huruf (kejar paket A, B, dan C), sehingga masyarakat dapat menikmati akses pendidikan secara lebih luas. Sedangkan pada era Kurikulum Merdeka, telah disediakan

pendidikan gratis, salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta pemberian Dana BOS pada sekolah terus dilanjutkan untuk memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

### 3. Penyelenggaraan Ujian Nasional

Dalam menentukan kelulusan peserta didik, pada masa orde baru dilakukan Ujian Nasional. Sebelum tahun 2019, tepatnya sebelum Covid-19 menyebar, kebijakan Ujian Nasional masih diselenggarakan. Tetapi, setelah tahun 2019, dengan lahirnya Kurikulum Merdeka, maka ujian nasional diubah menjadi Asesmen Nasional (AN) yang lebih fokus mengukur capaian belajar dan mutu pendidikan.

## 4. Simpulan

Artikel ini berupaya untuk menyusun seperti apa kebijakan kebijakan yang dilahirkan di era Orde Baru, dan bagaimana realitas di dalam pelaksanaan kebijakan kebijakan pendidikan tersebut. Kuatnya perpolitikan di dalam negeri khususnya di era Orde Baru, sehingga menjadi satu alat legitimasi dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pendidikan pada khususnya sangat besar dipengaruhi oleh kuatnya politik Orde Baru.

Di era Orde Baru dengan segala fenomena yang terjadi menciptakan berbagai banyak perubahan. Terutama dalam sistem pendidikan, yang dalam perjalanan sejarahnya menyimpan berbagai situasinya tersendiri. Diketahui bahwa tujuan umum pendidikan telah diatur dan dupaparkan didalam UUD 1945 bab XII pasal 31. Undang Undang diatas kemudian diperkuat dengan diterbitkannya pasal 4 ketetapan MPRS nomor XXI/MPRS/1966, yang didalamnya memuat mengenai pendidikan wajib.

Peralihan Orde Lama ke Orde Baru diperjelas oleh 2 hal, diantaranya usaha terwujudnya manusia yang pancasilais dengan latar belakang meletusnya peristiwa Gerakan 30 September dan peristiwa 1 Oktober, dan masa dimana Partai Komunis Indonesia dituduh oleh Orde Baru serta dicap sebagai penghianat yang memiliki tujuan mengubah dasar negara Pancasila menjadi Komunis. Selanjutnya yang kedua adalah menanamkan pengaruh terhadap mental mental masyarakat yang sebelumnya telah termakan oleh doktrin doktrin Manipol USDEK yang dicanakan oleh Presiden Soekarno.

Prinsip-prinsip pancasila diharapkan terus diterapkan di berbagai bidang, terutama pendidikan. Pendidikan Pancasila dan Pelatihan Mental Ideologi (P4) menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan loyalitas oleh pemerintah terhadap peserta didik. Dari hal ini kemudian menimbulkan berbagai perdebatan tentang independensi pendidikan dan kebebasan berpikir di kalangan akademisi dan masyarakat.

Presiden Soeharto mencanangkan program Gerakan Wajib Belajar yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan pendidikan di Indonesia. Program Gerakan Wajib Belajar memberikan kesempatan yang adil dan wajar bagi masyarakat umum, berusia 7 hingga 12 tahun, untuk memperoleh pengalaman mengajar. Program terakhir pada masa Orde Baru adalah program wajib belajar usia sembilan tahun. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 0306/U/1995, serta UU No 20 Tahun 2003. Disebutkan bahwa program ini hanya dapat diikuti oleh warga negara yang berusia tujuh hingga lima belas tahun.

Dalam berbagai kebijakan yang dilahirkan pada era Orde Baru memang menunjukkan jalan menuju kemajuan pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ada banyak hal hal yang dianggap bertentangan ataupun menyimpang dari apa yang telah dicanangkan dan diprogramkan. Sistem pendidikan sentralisasi atau terpusat justru dalam penerapannya menjadikan kualitas pendidikan semakin menurun.

Sistem doktrinisasi mengharuskan dilaksanakannya penerapan P4 baik pada pendidikan tingkat Sekolah Dasar maupun Perguruan Tinggi. Salah satu poin P4 adalah menolak segala pengaruh dari luar baik pengaruh buruk maupun pengaruh baik. Sehingga, ada ketakutan di tengah masyarakat dalam mengikuti perkembangan zaman.



Orientasi politik di era Orde Baru yang cukup ketat, menjadikan segala bentuk program pendidikan dimana tujuan utamanya adalah memperbaiki taraf kehidupan rakyat dan meningkatkan SDM Indonesia justru menghalangi kemajuan rakyat. Apa yang telah menjadi keputusan pemerintah di era Orde Baru tidak diperbolehkan untuk dikritik maupun dilanggar.

Penyelenggaraan otonomi kebijakan pendidikan di daerah dalam rangka penyelenggaraan program wajib belajar 9 tahun. Akan tetapi, semuanya sangat tidak berjalan dengan baik. Penyelenggaraan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi (KIS) antara Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak berjalan dengan baik. Ada banyak temuan data mengenai kekurangan instansi instansi yang melaksanakan penyelenggaraan KIS.

Inpres Pendidikan Dasar dalam pelaksanaannya, sangat bertimbal balik dari apa yang diharapkan. Daripada segi kuantitas pengaplikasian Inpres ini, hanya mementingkan banyaknya lulusan terdidik dan sangat jauh dari kualitas pendidikan dan pengajaran. Pendidikan era Orde Baru terlihat beberapa kekurangan dan terlihat pada hasil-hasil produk pendidikan dituntut hanya untuk menjadi pekerja, banyak melahirkan kaum terdidik yang sangat tumpul terhadap kepekaan sosial, dan hilangnya kebebasan dalam berpendapat.

### References

- Agista. (1998). Transformasi Penataran P4 Masa Orde Baru Ke Dalam Kurikulum Merdeka: Tinjauan Terhadap Implementasi P5 Dalam Pendidikan Nasional. *Jurnal Unindra*, 1–10.
- Amalia, V. R., & Asbari, M. (2023). Merdeka Belajar: Solusi Awal Transformasi Pendidikan Indonesia? *JISMA: Journal of Information Systems and Management*, 02(05), 62–67. <https://jisma.org>
- Andrea, L. (2016). Konsep Manajemen Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1, 43.
- Cahyaningsih, G. D. (2016). Latar Belakang Wajib Belajar Masa Orde Baru Tahun 1984. *AVATAR: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 979–989.
- Datumula, S. (2021). Peraturan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Dan Kabinet Kerja. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 56–78. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.27>
- Herwanto. (2007). Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun Dalam Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 16, 77–86.
- Khaeruddin, & Rahmania. (2022). Era Reformasi; Titik Balik Pendidikan Indonesia. *Nubin Smart Journal*, 2(2), 16–25.
- Kusmawati, H., Nurona, A. L., Maulana, I., Khasanah, R., & Dewi, R. A. (2023). Perkembangan Pendidikan Indonesia Setelah Tahun 1965 Sampai Runtuhnya Orde Baru. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 4054–4062.
- Muzammil, A. (2016). Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dari Orde Lama sampai Orde Baru (Suatu Tinjauan Historis). *POTENSLA: Jurnal Kependidikan Islam*, 2(2), 183.
- Naredi, H. (2019). Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Dekonstruksi Sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 3(1), 33–42. <https://doi.org/10.17509/historia.v3i1.20731>
- Neolaka, A., & Neolaka, G. (2017). *Landasan Pendidikan*. Kencana.
- Nursyifa, A. (2019). Transformasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 51–64. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v6i1.y2019.p51-64>
- Rachmi, Surachman, A., Putri, D. E., Nugroho, A., & Salfin. (2024). Transformasi Pendidikan di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Banjarese: Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(2), 52–63.
- Rambung, O. S., Sion, Bungamawelona, Puang, Y. B., & Salenda, S. (2023). Transformasi Kebijakan Pendidikan Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3),

598–612.

- Rinawati, A. (2015). Transformasi Pendidikan untuk Menghadapi Globalisasi. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 93–103. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v3i1.12783>
- Safei, S., & Hudaidah, H. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). *Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 7(1), 1–13.
- Setiyawan, R., & Wahyuni, H. I. (2023). Gender dan Ekologi dalam Pendidikan Indonesia Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi: Perspektif Ekofeminisme. *Humanis*, 27(1), 75–89. <https://doi.org/10.24843/jh.2023.v27.i01.p08>
- Si, M. (n.d.). Perkembangan Politik Pendidikan Di Indonesia (Kajian Era Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi). 2012, 1–21.
- Smith, I. A., & Sya'diyah, Z. (2023). *Pengembangan dan Problematika Pendidikan di Wilayah Kepulauan*.
- Tati, A. D. R. (2015). Kurikulum Pendidikan di SD dan SMA Pada Masa Orde Baru. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(2), 89–102. <https://doi.org/10.21009/jps.042.09>
- Wijaya, E. Y., Sudjimat, D. A., & Nyoto, A. (2016). Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika*, 1, 263–278. <http://repository.unikama.ac.id/840/32/263-278> Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global .pdf. diakses pada; hari/tgl; sabtu, 3 November 2018. jam; 00:26, wib.
- Yamin, M. (2015). Pendidikan Pada Masa Orde Baru. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(1), 1–13.
- Yusuf, M., Julianingsih, D., & Ramadhani, T. (2023). Transformasi Pendidikan Digital 5.0 melalui Integrasi Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 2(1), 11–19. <https://doi.org/10.33050/mentari.v2i1.328>